

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU :

Dr. H. Abdullah Gofar, SH.,MH., 2014, *Teori dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*

Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, cetakan XIII, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 1991), Hlm.48

Paulus Efendi Lotulung, 2013, *Hukum Tata Usaha Negara*, Jakarta Selatan:Salemba Humanika

Rudy, 2022, *Hukum Pemerintah Desa*, CV Anugrah Utama Raharja

Soekanto, Mamudji, 2019, *Penelitian Hukum Normatif*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada

Badriyah Khaleed. 2016. *Mekanisme Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)*. Yogyakarta:Pustaka Yustisia, hlm 5.

Titik Triwulan, dan ismu gunadi widodo. 2011. *hukum tata usaha negara dan*

hukum

acara peradilan tata usaha negara Indonesia. Jakarta:kencana, hlm 567-568.

Soekanto, S. (1986). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Press

Indroharto. (1993). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Gajah Mada University Press)

H.A.W. Widjaja, Pemerintahan Desa/Marga, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 13.

Suhartono, dkk., Politik Lokal Parlemen Desa: Awal Kemerdekaan sampai Jaman Otonomi Daerah, Laper Pustaka Utama, Yogyakarta, 2001, hlm 14.

Kim Lentera, (Online),(<http://www.karanganyar.desa.id/2017/11/17/memahami-kewenangan-desa-berdasarkan-uu-desa/>

Isharyanto, Hukum Pemerintahan Desa, Absolute Media, Yogyakarta hlm 24

Sapirin, Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa, ejournalunigoro, hlm 14

Filmon Mikson Polin, S.H., M.H. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara , Media Nusa Creative, Malang

JURNAL:

Anton Subagyo, Andika Wijaya “Pelaksanaan Pengawasan Sebagai Upaya Pendisiplinan Kerja Perangkat Desa (Studi Kasus di Kantor Desa Pijeran Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo)” Vol. 11 No. 1 Januari 2022

Hanif Nurcholis, Pemerintahan Desa: “Unit Pemerintahan Palsu” Dalam Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (Kasus Desa Jabon Mekar, Parung, Kabupaten Bogor). Jurnal Politica Vol. 5 No. 1 Juni 2014. Hlm. 80

Kresna Anggoro Aji W, Indriati Amarini “ Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus di Badan Kepegawaian dan *Pengembangan* Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas) UM Purwokerto Law Review Vol. 4 No. 1 Februari 2023

Muhammad Harlie “Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi Dan Pengembangan Karier Terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintahan Kabupaten

Tabalong di Tanjung Kalimantan Selatan” Jurnal Manajemen dan Akuntansi,
Vol.11 No.2 (2010) hlm. 861

Nelli Fitri Khumaidi. Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa Di Desa
Tamangede Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal.Skripsi, Universitas Negeri
Semarang, 2020. Hal 3.

Rikardus *Venansius* Acik “Penyelesaian Sengketa Kepegawaian Melalui Upaya
Administrasi Terhadap Sanksi Hukuman Disiplin Kepegawaian Negeri Sipil Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman Setelah Berlakunya PP No. 53
Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil” Jurnal Ilmiah, 2014

Lelisari, dkk, Peningkatan Pemahaman Masyarakat Tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Desa melalui Sosialisasi Peraturan Perundang-
Undangan No 6 Tahun 2014, Jurnal JPMB: Jurnal Pemberdayaan Masyarakat

Desi Sommaliagustina,Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah

Sosial Budaya(halaman 444)

Pemdes bumiayu,undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

Analisis Yuridis Pemberhentian Perangkat Desa Pada Desa Donggala Kabupaten
Kolaka Tahun 2023,Wahyu Prianto (halaman 20)

UNDANG-UNDANG:

Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014Tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor
6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang
Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Peraturan Daerah KabupatenDompu Nomor 6 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas
Peraturan DaerahKabupatenDompu Nomor 2 tahun 2015 Tetang Tata Cara
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

PUTUSAN:

18/G/2023/PTUN.MTR

37/B/2023/PT.TUN.MTR

150PK/TUN/2024

1/PKK TUN /2025